

**ANALYSIS OF FACTORS WHICH CAUSED STATEMENT OF
BUDGETING OF APBN FUNDS IN THE END OF THE BUDGET
YEAR IN THE WORKING UNITS OF SCOPE OF PAYMENT
OFFICE OF BLITAR COUNTRY SERVICES**

Evita Intan Saputri¹, Dyah Pravitasari²

IAIN Tulungagung

evitaintan2@gmail.com, dyah_pravitasari@yahoo.com

Abstract : APBN which tends to increase every year, but not followed by a good absorption pattern. This causes a buildup of disbursement of APBN funds at the end of the fiscal year. This can result in losses for the country. This study discusses the factors that caused the accumulation of disbursement of APBN funds at the end of the fiscal year. This study aims to analyze the factors that cause the accumulation of disbursement of APBN funds at the end of the fiscal year in the scope of payment of the Blitar State Treasury Service Office. The method used is a quantitative associative type. Direct researchers give questionnaires to respondents to get data. The results of data analysis showed that the eight factors consisted of administration, human resources, planning, procurement of goods and services, mutations of officials, providers of goods and services, regulations, and internal. Factors of official and internal mutations affect the buildup of funds disbursement. While administrative factors, human resources, planning, procurement of goods and services, providers of goods and services, and regulations have no effect. In silmutan administration, human resources, planning, procurement of goods and services, mutations of officials, providers of goods and services, regulations, and internal positive and significant effect on the accumulation of disbursement of APBN funds.

Keywords: APBN, Work Unit, Stacking of disbursement of funds

PENDAHULUAN

Pemerintah mengelola secara langsung keuangan publik yang dimana setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang, dan barang milik negara yakni harga tetap, barang bergerak, dan barang dalam persediaan, keuangan publik yang dimaksud disini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Terdapat dua fungsi anggaran yang pertama anggaran sebagai alat perencanaan dan yang kedua anggaran sebagai alat pengendalian.¹⁴

APBN sebenarnya sudah ada pada saat masa Rasulullah, namun lebih dikenal dengan Baitul Mal. Baitul Mal sendiri merupakan lembaga yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara.¹⁵ APBN dan Baitul Mal mempunyai tujuan yang sama yaitu menyejahterakan masyarakatnya, namun pemerintahan Islam selalu menggunakan prinsip-prinsip keadilan dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam islam juga termasuk kesejahteraan rohani di dunia dan akhirat bukan hanya memikirkan hal

duniawi saja. Hal duniawi yang dimaksud disini yaitu kekayaan material yang tiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan nasional.

Sampai dengan bulan Oktober 2019 data KPPN Blitar menunjukkan bahwa realisasi belanja modal hanya sebesar 42,37%. Penyerapan dana ini masih jauh dibawah target yang seharusnya sudah mencapai 85%. Penyerapan anggaran yang lambat ini telah di tangani oleh pemerintah. Namun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah belum bisa menghilangkan masalah penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran.

Dari beberapa faktor tersebut menurut penelitian yang dilakukan Priatno¹⁶ yang paling signifikan mempengaruhi ada faktor pengadaan barang dan jasa serta faktor perencanaan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Widianingrum¹⁷ terdapat enam faktor

¹⁴ Tjahjanulin Domai, *Manajemen Keuangan Publik*, (Malang: Universitas Brawijaya Perss, 2013), hal.59

¹⁵ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hal 151-152

¹⁶ Prasetyo Adi Priatno, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Bliar, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), diakses pada tanggal 03 September 2019 pada pukul 14:16 WIB.

¹⁷ Desika Widianingrum, dkk, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 11, No. 2 2017,

yang menjadi penyebab penumpukan pencairan dana yaitu faktor perencanaan, faktor pengadaan barang/jasa, faktor regulasi, faktor internal, faktor administrasi, faktor sumber daya manusia. Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar.

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan keuangan publik yang dikelola langsung oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.¹⁸ Setiap tahunnya APBN ditetapkan dengan undang-undang, dan barang milik negara yakni harga tetap, barang bergerak, dan barang dalam persediaan. Penyusunan APBN harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana negara yang berpedoman pada rencana kerja

pemerintah. Kemudian APBN harus mendapat persetujuan dari DPR, apabila ternyata RAPBN ditolak oleh DPR maka pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kementerian Negara/lembaga. Dokumen tersebut harus mendapat pengesahan dari Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku BUN. DIPA bisa dijadikan alat pengendalian, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus perangkat akuntansi pemerintah¹⁹

DIPA di bagi menjadi dua yaitu DIPA Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (DIPA BA K/L) dan DIPA Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara (DIPA BA BUN). Isi dari DIPA sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu DIPA Induk dan DIPA petikan. Sebelum dibuatnya DIPA satker harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) yang mencakup

diakses pada tanggal 03 September 2019 pada pukul 14:28 WIB.

¹⁸ Tjahjanulin Domai, *Manajemen Keuangan Publik...*, hal. 103

¹⁹ Zeembry, dkk, *212 Tips Mastering Professional Web Design*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hal. 196

informasi lengkap mengenai anggaran pada tahun berjalan. Selanjutnya Kementerian Negara/Lembaga menyusun DIPA berdasarkan RKA-KL yang telah ditetapkan. DIPA harus disahkan oleh Menteri Keuangan

Pencairan Dana

Pencairan dana merupakan kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan rancangan anggaran yang telah dibuat. Dapat dikatakan juga pencairan dana ada proses menguangkan anggaran atau mengambil uang yang disediakan untuk pendanaan suatu kegiatan. Pencairan dana dengan menerbitkan SP2D adalah proses pemindahan dana dari kas negara ke rekening satker. Sebelum diterbitkannya SP2D harus ada Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibedakan menjadi empat sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), Surat Perintah Membayar Uangan Persediaan (SPM-TU), serta Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP).²⁰

Mekanisme Pencairan Dana APBN

Mekanisme pencairan dana tidak lepas dari Surat Permintaan

²⁰ Nurkholis, *Penganggaran Sektor Publik*, (Malang: UB Press, 2019), hal. 65

Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN. Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP). Setelah SPP jadi selanjutnya harus segera disampaikan kepada PA/Kuasa PA agar dapat disampaikan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar. Kemudian Petugas penerima SPP akan menyampaikan SPP tersebut kepada Pejabat Penguji SPP untuk dilakukan pengujian SPP. Setelah SPP diuji maka akan diterbitkan SPM untuk disampaikan KPA kepada kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).²¹ SPM sendiri dikatakan sah apabila terdapat tandatangan pejabat yang diberi kewenangan.

PA/Kuasa PA menyerahkan Surat Perintah Membayar di loket penerimaan SPM yang ada di KPPN, yang kemudian akan diserahkan oleh petugas kepada Seksi Pencairan Dana setelah semua berkas lengkap. SPM tersebut akan diuji oleh petugas, pengujian SPM ini berupa pengujian

²¹ Anfujiatin, Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 14, No. 1 2016, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pada pukul 10:33 WIB.

subtandi dan pengujian formal. Setelah dilakukan pengujian maka terdapat dua kemungkinan, yaitu SPM ditolak dan SPM diterima. Jika SPM ternyata ditolak maka Seksi Pencairan Dana tidak menerbitkan atau menolak menerbitkan SP2D. Sedangkan jika SPM diterima maka Seksi Pencairan Dana akan menerbitkan SP2D.²²

Penyerapan Dana APBN

Penyerapan APBN sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penyerapan anggaran sendiri masih mengalami keterlambatan yang menjadi masalah secara terus-menerus tiap tahunnya. Lambatnya penyerapan anggaran ini tentunya akan berdampak pada penyelesaian program dan kegiatan pemerintah. Manfaat belanja dapat hilang karena target penyerapan anggaran tidak tercapai, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur.²³

²² Anfujatin, Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 14, No. 1 2016, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pada pukul 10:52 WIB.

²³ Mulyono, *Berprestasi Melalui JFP AYO Kumpulkan Angka Kreditmu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.74

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba memberikan gambaran fenomena secara detail.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja (satker) di lingkup pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar yang berjumlah sebanyak 66 satker mitra KPPN Blitar. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara *simple random sampling* dalam pengambilan sampel. *Sampling simple random* adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.²⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Validitas dan Reabilitas
 - a) Uji Validitas

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hal. 62

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 82

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang tentang variabel yang dimaksud.²⁶ Dalam penelitian ini uji validasi menggunakan bantuan dari SPSS dengan nilai signifikansi 5%

b) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah analisis yang banyak digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang menggunakan skala, kuesioner atau angket.²⁷ Menurut Sekaran dalam Priyanti jika reliabilitas kurang dari 0,6 kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 dinyatakan baik.²⁸

2. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.²⁹ Penelitian ini menggunakan uji

Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitasnya dengan kriterian pengujian $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal atau H1 diterima. Sedangkan, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi secara normal atau H1 ditolak.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.³⁰ Jika antara variabel independen saling berkorelasi maka akan ada multikolinieritas dan begitu juga sebaliknya. Multikolinieritas dapat dinilai dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika dalam model VIF tidak lebih dari 10 maka terbebas dari multikolinieritas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.³¹ Heteroskedastisitas pada suatu model dapat dideteksi

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 86

²⁷ Duwi Priyanti, *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hal. 167

²⁸ *Ibid*, hal. 172

²⁹ Husein Umar, *Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 181

³⁰ *Ibid*, hal. 177

³¹ *Ibid*, hal. 179

dengan melihat pola titik-titik *Scatterplot* regresi.

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi.³² Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat tabel DW (*Durbin-Watson*).

d) Uji Regresi Linier Berganda

Setelah semua uji asumsi klasik tersebut terpenuhi dan jika data yang dianalisis terbukti normal, untuk mengetahui faktor administrasi, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor perencanaan, faktor pengadaan barang dan jasa, faktor mutasi pejabat, faktor penyedia barang dan jasa, faktor regulasi, faktor internal terhadap Penumpukan Pencairan dana APBN, maka digunakan alat analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ganda digunakan untuk memprediksi pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat.

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:³³

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8 + e$$

Keterangan:

Y : jumlah pengungkapan *sustainability report* perusahaan berdasarkan pedoman *Sustainability Report Guidelines* versi G4

α : Konstanta

X₁ : Administrasi

X₂ : Sumber Daya Manusia (SDM)

X₃ : Perencanaan

X₄ : Pengadaan barang dan jasa

X₅ : Mutasi pejabat

X₆ : Penyedia barang dan jasa

X₇ : Regulasi

X₈ : Internal

e : Tingkat kesalahan atau gangguan (*Error*)

Hasil persamaan regresi tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pengujian selanjutnya

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan bahwa hipotesis dalam penelitian ini berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat, maka digunakan beberapa pengujian yaitu uji-t dan uji F.

a) Uji secara Parsial (Uji t)

³² Duwi Priyatno, *SPSS Untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hal. 59

³³ Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistika 2*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2016), hal. 137

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menjawab hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Membandingkan nilai statistik dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
 - 2) Jika nilai signifikansi $\alpha < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi $\alpha > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Uji F
- Uji statistik F menunjukkan apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara serentak terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian dengan tingkat

signifikansi $\alpha = 5 \%$ atau 0,05, sebagai berikut:

- 1) Jika p-value $< 0,05$ menunjukkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian.
- 2) Jika p-value $> 0,05$ menunjukkan bahwa model ini tidak layak digunakan dalam penelitian.³⁵

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.³⁶ Rumus koefisien determinasi (R^2) adalah:

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien Determinasi

r^2 : Koefisien Korelasi

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda maka masing-masing variabel independen yaitu faktor administrasi (X1), faktor sumber daya manusia (X2), faktor perencanaan (X3), faktor pengadaan barang dan jasa (X4), faktor mutasi pejabat (X5), faktor penyedia barang dan jasa (X6),

³⁴ Agus Widarjono, *Analisis Statistik Multivariat Terapan*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2010), hal. 25

³⁵ Dergibson S. Sugiarto, *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2006), hal. 259

³⁶ Duwi Prayitno, *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariat dengan SPSS*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2013), hal. 74

faktor regulasi (X7), faktor internal (X8) secara parsial dan silmutan mempengaruhi variabel dependen yaitu penumpukan pencairan dan (Y).

Nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai dengan 1, dimana semakin mendekati angka 1 koefisien determinasi maka pengaruhnya semakin kuat. Dan sebaliknya, semakin mendekati angka 0 nilai koefisiensi determinasi maka pengaruhnya semakin lemah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	No. Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Administrasi (X1)	X1.1	0,501	0,261	Valid
	X1.2	0,547	0,261	Valid
	X1.3	0,633	0,261	Valid
	X1.4	0,587	0,261	Valid
	X1.5	0,491	0,261	Valid
SDM (X2)	X2.1	0,693	0,261	Valid
	X2.2	0,666	0,261	Valid
Perencanaan (X3)	X3.1	0,320	0,261	Valid
	X3.2	0,641	0,261	Valid
Pengadaan Barang dan Jasa (X4)	X4.1	0,321	0,261	Valid
	X4.2	0,408	0,261	Valid
	X4.3	0,758	0,261	Valid
	X4.4	0,366	0,261	Valid
	X4.5	0,621	0,261	Valid
	X4.6	0,651	0,261	Valid
Mutasi Pejabat	X5.1	0,672	0,261	Valid

(X5)				
Penyediaan Barang dan Jasa (X6)	X6.1	0,715	0,261	Valid
	X6.2	0,756	0,261	Valid
Regulasi (X7)	X7.1	0,691	0,261	Valid
Internal (X8)	X8.1	0,582	0,261	Valid
	X8.2	0,743	0,261	Valid
	X8.3	0,728	0,261	Valid
	X8.4	0,279	0,261	Valid
Penumpukan Pencairan Dana (Y)	Y.1	0,825	0,261	Valid
	Y.2	0,766	0,261	Valid
	Y.3	0,781	0,261	Valid

Sumber : Data yang diolah peneliti dengan SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas, seluruh item dalam kuesioner adalah valid karena r hitung lebih besar dari r tabel. Jadi dalam penelitian ini semua item pertanyaan dalam kuesioner memenuhi persyaratan validitas dan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.931	26

Sumber: Data diolah SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* adalah 0,931, ini menunjukkan bahwa instrumen dinyatakan baik atau sangat reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		SKOR_ANGKET
N		57
Normal	Mean	69.07
Parameters ^a	Std. Deviation	11.022
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.074
	Negative	-.126
Kolmogorov-Smirnov Z		.949
Asymp. Sig. (2-tailed)		.328

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,328 yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	-1.101	0.277		
Administrasi (X1)	1.837	0.072	0.539	1.854
SDM (X2)	1.894	0.064	0.394	2.537
Perencanaan (X3)	-0.86	0.394	0.512	1.954
Pegadaan Barang dan Jasa (X4)	1.972	0.054	0.295	3.391
Mutasi Pejabat (X5)	2.514	0.015	0.536	1.865
Penyediaan Barang dan Jasa (X6)	-0.02	0.984	0.314	3.186
Regulasi (X7)	0.903	0.371	0.487	2.051
Internal (X8)	3.155	0.003	0.543	1.842

a. Dependent Variable: Penumpukan Pencairan Dana (Y)

Sumber : Data diolah SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari

administrasi sebesar 1,854, SDM sebesar 2,537, perencanaan sebesar 1,954, pengadaan barang dan jasa sebesar 3,391, mutasi pejabat sebesar 1,865, penyedia barang dan jasa sebesar 3,186, regulasi sebesar 2,051, internal sebesar 1,842. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen dari asumsi klasi multikolinieritas lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan variabel independen terbebas dari asumsi klasik multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah SPSS 16.0, 2020

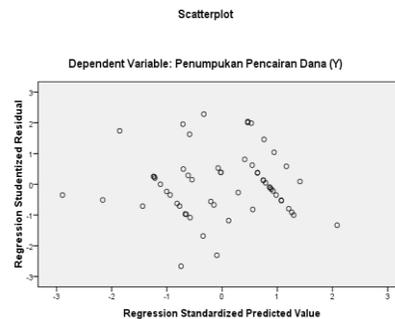
Berdasarkan gambar 1 hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0 dan 3, dan juga titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.889 ^a	.791	.756	.853	1.827

a. Predictors: (Constant), Internal (X8), Perencanaan (X3), Mutasi Pejabat (X5), Administrasi (X1), Regulasi (X7), Pegadaan Barang dan Jasa (X4), SDM (X2), Penyedia Barang dan Jasa (X6)



b. Dependent Variable: Penumpukan Pencairan Dana (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 5 diatas nilai Durbin-Watson sebesar 1,827. Dimana jika angka D-W diantara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi. Sehingga $-2 < 1,827 < 2$, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini terbebas dari asumsi klasi autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	T	Sig.
(Constant)	-1.101	0.277
Administrasi (X1)	1.837	0.072
SDM (X2)	1.894	0.064
Perencanaan (X3)	-0.86	0.394
Pegadaan Barang dan Jasa (X4)	1.972	0.054
Mutasi Pejabat (X5)	2.514	0.015
Penyedia Barang dan Jasa (X6)	-0.02	0.984
Regulasi (X7)	0.903	0.371
Internal (X8)	3.155	0.003

a. Dependent Variable:
Penumpukan Pencairan
Dana (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 6 maka dapat diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + b_7x_7 + b_8x_8 + e$$

$$Y = (-1,052) + 0,115X_1 + 0,281X_2 + (-0,142X_3) + 0,161X_4 + 0,522X_5 + (-0,04X_6) + 0,169X_7 + 0,222X_8 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan berikut:

- a) Nilai konstanta bernilai negatif sebesar -1,052, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel administrasi

(X1), sumber daya manusia (X2), perencanaan (X3), pengadaan barang dan jasa (X4), mutasi pejabat (X5), penyedia barang dan jasa (X6), regulasi (X7), dan internal (X8) dalam keadaan tetap (konstan) maka penumpukan pencairan dana akan mengalami penurunan.

- b) Koefisien regresi variabel administrasi (X1) bernilai positif sebesar 0,115. Hal ini berarti apabila variabel administrasi ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan tingkat penumpukan pencairan dana sebesar 0,115.

- c) Koefisien regresi variabel sumber daya manusia (X2) bernilai positif sebesar 0,281. Hal ini berarti apabila variabel sumber daya manusia ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan tingkat penumpukan pencairan dana sebesar 0,281.

- d) Koefisien regresi variabel perencanaan (X3) bernilai negatif sebesar -0,142. Hal ini berarti apabila variabel perencanaan ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan tingkat penumpukan pencairan dana sebesar -0,142.

- e) Koefisien regresi variabel pengadaan barang dan jasa (X4) bernilai positif sebesar 0,161. Hal ini berarti apabila variabel pengadaan barang dan jasa ditingkatkan satu

satuan, maka akan meningkatkan tingkat penumpukan pencairan dana sebesar 0,161.

- f) Koefisien regresi variabel mutasi pejabat (X5) bernilai positif sebesar 0,522. Hal ini berarti apabila variabel administrasi ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan tingkat penumpukan pencairan dana sebesar 0,522.
- g) Koefisien regresi variabel penyedia barang dan jasa (X6) bernilai negatif sebesar -0,004. Hal ini berarti apabila variabel administrasi ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan tingkat penumpukan pencairan dana sebesar -0,004.
- h) Koefisien regresi variabel regulasi (X7) bernilai positif sebesar 0,169. Hal ini berarti apabila variabel regulasi ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan tingkat penumpukan pencairan dana sebesar 0,169.
- i) Koefisien regresi variabel internal (X2) bernilai positif sebesar 0,222. Hal ini berarti apabila variabel internal ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan tingkat penumpukan pencairan dana sebesar 0,222.

Uji Hipotesis

1. Uji T (Uji Parsial)

Tabel 7
Hasil Uji T-Test

Model	t	Sig.
(Constant)	-1.101	0.277
Administrasi (X1)	1.837	0.072
SDM (X2)	1.894	0.064
Perencanaan (X3)	-0.86	0.394
Pegadaaan Barang dan Jasa (X4)	1.972	0.054
Mutasi Pejabat (X5)	2.514	0.015
Penyedia Barang dan Jasa (X6)	-0.02	0.984
Regulasi (X7)	0.903	0.371
Internal (X8)	3.155	0.003

a. Dependent Variable: Penumpukan Pencairan Dana (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengaruh Administrasi (X1) terhadap penumpukan pencairan dana (Y)

Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Faktor administrasi berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara parsial di dapat nilai administrasi t_{hitung} 1,837 < t_{tabel} 2,004 dan nilai p-value (Sig.)

sebesar 0,072 lebih besar dari nilai α sebesar 0,05 (Sig. (0,072) > α (0,05)), maka H1 ditolak. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

- b. Pengaruh sumber daya manusia (X2) terhadap penumpukan pencairan dana (Y)

Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Faktor sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara parsial di dapat nilai sumber daya manusia $t_{hitung} 1,894 < t_{tabel} 2,004$ dan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,064 lebih besar dari nilai α sebesar 0,05 (Sig. (0,064) > α (0,05)), maka H1 ditolak. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

- b) Pengaruh perencanaan (X3) terhadap penumpukan pencairan dana (Y)

Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Faktor perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara parsial di dapat nilai perencanaan $t_{hitung} -0,860 < t_{tabel} 2,004$ dan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,394 lebih besar dari nilai α sebesar 0,05 (Sig. (0,394) > α (0,05)), maka H1 ditolak. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

- c) Pengaruh pengadaan barang dan jasa (X4) terhadap penumpukan pencairan dana (Y)

Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Faktor pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara parsial di dapat nilai pengadaan barang dan jasa $t_{hitung} 1,972 < t_{tabel} 2,004$ dan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,054 lebih besar dari nilai α sebesar 0,05 (Sig. (0,054) $> \alpha$ (0,05)), maka H1 ditolak. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

- d) Pengaruh mutasi pejabat (X5) terhadap penumpukan pencairan dana (Y)

Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

- H1 : Faktor mutasi pejabat berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara parsial di dapat nilai mutasi pejabat $t_{hitung} 2,514 > t_{tabel} 2,004$ dan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,015 lebih besar dari nilai α sebesar 0,05 (Sig. (0,015) $< \alpha$ (0,05)), maka H1 diterima. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa mutasi pejabat berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir

tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

- e) Pengaruh penyedia barang dan jasa (X6) terhadap penumpukan pencairan dana (Y)

Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

- H1 : Faktor penyedia barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara parsial di dapat nilai penyedia barang dan jasa $t_{hitung} -0,020 < t_{tabel} 2,004$ dan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,984 lebih besar dari nilai α sebesar 0,05 (Sig. (0,984) $> \alpha$ (0,05)), maka H1 ditolak. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa penyedia barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

- f) Pengaruh Regulasi (X7) terhadap penumpukan pencairan dana (Y)

Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

- H1 : Faktor regulasi berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara parsial di dapat nilai regulasi t hitung $0,903 < t_{\text{tabel}} 2,004$ dan nilai p -value (Sig.) sebesar 0,371 lebih besar dari nilai α sebesar 0,05 (Sig. (0,371) $> \alpha$ (0,05)), maka H1 ditolak. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

- g) Pengaruh internal (X8) terhadap penumpukan pencairan dana (Y)

Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

- H1 : Faktor internal berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara parsial di dapat nilai internal t hitung $3,155 > t_{\text{tabel}} 2,004$ dan nilai p -value (Sig.) sebesar 0,003 lebih besar dari nilai α sebesar 0,05 (Sig. (0,003) $< \alpha$ (0,05)), maka H1 diterima. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa internal berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

Uji F

Tabel 8
Hasil Uji F-Test

Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
Regression	132.14	16.517	22.7	.000 ^a
Residual	34.917	0.727		
Total	167.05			

b. Dependent Variable: Penumpukan Pencairan Dana (Y)

Sumber : Data diolah SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa hasil analisis regresi secara simultan di dapatkan nilai F hitung sebesar 22,706 yang lebih besar dari F tabel 2,108 dan dapat dilihat nilai p -value (Sig.) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05 (Sig. (0,000) $< \alpha$ (0,05)), maka H1 diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi, sumber daya manusia, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, mutasi pejabat, penyedia barang dan jasa, regulasi, dan internal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai R square sebesar 0,791, yang berarti variabel administrasi, sumber daya manusia, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, mutasi pejabat, penyedia barang dan jasa, regulasi, dan internal secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi penumpukan pencairan dana sebesar 75,6%. Sedangkan sisanya sebesar 24,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil pengolahan data dengan menggunakan alat regresi linier berganda dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab penumpukan pencairan dana APBN yaitu faktor administrasi, sumber daya manusia, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, mutasi pejabat, penyedia barang dan jasa, regulasi, dan internal. Faktor mutasi pejabat dan internal berpengaruh terhadap penumpukan pencairan dana sedangkan faktor administrasi, sumber daya manusia, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, penyedia barang dan jasa, dan regulasi tidak berpengaruh terhadap penumpukan pencairan

dana. Secara simultan kedelapan faktor tersebut berpengaruh terhadap penumpukan pencairan dana.

DAFTAR RUJUKAN

- Anfujatin. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 14, No. 1 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2005.
- Domai, Tjahjanulin. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Perss. 2013.
- Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: KENCANA. 2016.
- Mauludi, Ali. *Teknik Belajar Statistika 2*. Jakarta: Alim's Publishing. 2016.
- Mulyono. *Berprestasi Melalui JFP AYo Kumpulkan Angka Kreditmu*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

- Nordiawan, Deddi, dkk. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press. 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 38.
- Priatno, Prasetyo Adi. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Bliar. Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan. 2013.
- Priyanti, Duwi. *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*. Yogyakarta: ANDI. 2009.
- Priyatno, Duwi. *SPSS Untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Yogyakarta: Gava Media. 2009.
- Sugiarto, Dergibson S. *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Umar, Husein. *Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Widarjono, Agus. *Analisis Statistik Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STM YKPN. 2010).
- Widianingrum, Desika, dkk. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 11, No. 2 2017.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2014.
- Zaenudinsyah, Fandi. Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN Pada Akhir Tahun Anggaran. *Jurnal Perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakn publik* Vol. 1, No. 1 2016.
- Zeembry, dkk. *212 Tips Mastering Professional Web Design*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2013.